**JURNAL KARYA ILMIAH**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN**



**DIMAS EDI P.**

**DIA. 110 249**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MATARAM**

**2017**

**Halaman pengesahan**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN**



**Menyetujui,**

Pembimbing I,

**Prof. Dr. Hj. Rodliyah, SH., MH.**

NIP. 19560705 198403 2 001

**ABSTRAK**

**Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Melakukan Pencurian**

Oleh Dimas Edi P

D 1A. 110.249

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui pengaturan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana; dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tidak pidana pencurian. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, dengan pendekatan meliputi dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual. Pengaturan perlindunan hukun terhadap anak-anak yang melakukan tindak pidana, secara khusus telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum kepada anak-anak dalam sistem peradilan pidana, terutama bagi mereka yang berhadapan dengan hukumm diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yaitu tentang Diversi berupa pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke peradilan di luar pidana. Bentuk peradilan bagi anak-anak yang melakukan tindak pidana pencurian dapat diterapkan secara bertahap, setiap pemeriksaan mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, sidang pengadilan (pemeriksaan perkara) dan tahapan pembinan di Lembaga Pemasyarakatan.

Kata Kunci: anak, tindak pidana, pencurian, perlindungan hukum

ABSTACT

**LEGAL PROTECTION FOR THE CHILDREN WHO CONDUCTING THEFT**

The aim of this research was to know the legal regulation for children who conducting criminal acts; and to know the form of legal protection to children who conducting theft crime. This research was normative research with the approach includes legislation approach (statute approach) and conceptual approach. The regulation of legal protection for children who conducted the crime, in particular has been regulated in the legislation. The Legal protection toward children in the criminal justice system, especially for those who are dealing with law regulated in the Act Number 11 Year 2012, which is about Diversion the form of transfer of children dispute settlement from the criminal justice process to outside criminal justice. The form of justice for children who conducting criminal theft can be implemented in step by step, each inspection starting from the step of investigation, prosecution, court (case investigation) and coaching in Penitentiary.

**Keywords: children, crime, theft, legal protection**

**I.PENDAHULUAN**

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.[[1]](#footnote-2)

Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak[[2]](#footnote-3).

Dewasa ini tingkat pencurian dilakukan oleh anak dibawah umur sudah semakin memperihatinkan. Sehingga tidak jarang anak harus berhadapan dengan proses hukum. Oleh karena anak adalah penerus generasi muda bangsa yang perlu dilindungi agar memiliki budi pekerti yang luhur, maka sudah sepatutnya hak-hak seorang anak harus dilindungi baik ia sebagai pelaku tindak pidana ataupun tidak.

Perumusan masalah dalam penelitian adalah bagaimanakah pengaturan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana dan bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana pencurian.

Adapun tujuan yang ingin di capai oleh penulis dalam penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana dan 2) untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana pencurian. Manfaat penelitian ini adalah 1) dalam penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para mahasiswa maupun para penegak hukum di dalam memahami perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana pencurian, 2) memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, serta mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian, 3) memberikan penjelasan yang lebih nyata mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian guna menambah literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah, 4) mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mengembangkan kemampuan penulis dalam mengkritisi persoalan-persoalan hukum, dan 5) memberikan masukan pada penegak hukum.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode Pendekatan 1) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), dan 2) Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*).

**II.PEMBAHASAN**

**Pengaturan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana**

Menurut hukum positif indonesia, masalah anak dibawah umur yang mengenai apabila mereka melakukan perbuatan melawan hukum tersebut, tidak begitu tegas diatur; apa yang seharusnya diperlakukan bagi mereka, dan bagaimana sistem penahanan dan sistem penyidikan yang diberikan kepada mereka juga belum ada diatur dalam hukum[[3]](#footnote-4).

Perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan dilakukan semenjak tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan tersebut. Selama proses peradilan tersebut , maka hak-hak anak wajib dilindungi oleh hukum yang berlaku an oleh sebab itu harus dilakukan secara konsekuen oleh pihak-pihak terkait dengan penyelesaian masalah anak nakal tersebut.

Penyidikan itu sendiri, berarti serangkaian tindakan penyidik, dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, sedangkan ”bukti”, dalam ketentuan tersebut di atas adalah meliputi alat bukti yang sah dan benda sitaan/barang bukti. Di Indonesia, masalah kewenangan dan ketentuan mengenai ”Penyidikan” diatur di dalam UU No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana yang menjadi dasar hukum pidana formil di Indonesia. Ketentuan mengenai aparat yang berwenang untuk melakukan penyidikan, selain diatur di dalam KUHAP, juga diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan lain di luar KUHAP.[[4]](#footnote-5)

Penyidikan merupakan kompensasi penyidik, termasuk menghentikannya (Pasal 109 ayat 2 KUHAP). Alasan pemberian wewenang penghentian penyidikan ada dua yaitu: 1) untuk menegakan prinsip penegakan hokum yang cepat, tepat, dan biaya ringan, sekaligus untuk tegaknya kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat. Jika penidik berkesimpulan bahwa hasil penyelidikan dan penyidikan tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut tersangka ke pengadilan, penyidik secara rmenyatakan penghentianpemeriksaan penyidikan, agar dengan demikian segera tercipta kepastian hokum, baik bagi penyidik sendiri, terutama kepada tersangka dan masyarakat, 2) supaya penyidik terhindar dari kemungkinan tuntutan ganti kerugian, jika perkaranya diteruskan ternyata tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut atau menghukum, dengan sendirinya member hak kepada tersangka/terdakwa untuk menuntut ganti kerugian berdasarkan Pasal 95 KUHAP.

Dalam praktik, alasan penghentian penyidikan adalah 1) delik yang terjadi merupakan delik aduan yang dapat dilakukan pencabutan; 2) perbuatan yang terjadi bukan merupakan perbuatan pidana; 3) anak masih sekolah dan masih dapat dibina orang tuanya, sehingga anak tersebut dikembalikan kembali kepada orang tuanya dan kasusnya tidak akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan ke pengadilan.

Menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana terdapat tugas-tugas penyidik yang berhubungan dengan tugas yang meliputi :`

**Penangkapan**

Tindakan penangkapan diatur dalam Pasal 16 sampai 19 KUHAP. Menurut Pasal 16 untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan. Sesuai dengan Pasal 18 KUHAP perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup dengan menunjukkan surat perintah penangkapan kecuali tertangkap tangan. Perlindungan hak-hak anak tersangka pelaku tindak pidana di atur juga dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Khusus tindakan penangkapan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, Polisi memperhatikan hak-hak anak dengan melakukan tindakan perlindungan terhadap anak, seperti:[[5]](#footnote-6) 1) Perlakukan anak dengan asas praduga tak bersalah, 2) Perlakuan anak dengan arif, santun dan bijaksana, dan tidak seperti terhadap pelaku tindak pidana dewasa, 3) Saat melakukan penangkapan segera memberitahukan orang tua dan walinya, 4) Anak tertangkap tangan segera memberitahukan orang tua atau walinya, 5) Wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, Polisi atau masyarakat berdasarkan pada asas kewajiban, 6) Penangkapan terhadap anak yang diduga sebagai tersangka bukan karena tertangkap tangan, merupakan kontak atau tahap pertama pertemuan antara anak dengan Polisi.

Kedudukan anak dalam proses pemeriksaan penyidikan terdapat nuansa yang menimbulkan hak-hak anak secara khusus yang dapat mengesampingkan upaya paksa dan tindakan paksa dari proses penyidikan. Kontak awal antara anak dan polisi harus dihindarkan dalam suasana kekerasan fisik dan psikis sehingga dalam proses penyidikan terdapat hak-hak anak yang meliputi: 1) Terhadap keluarga anak sebagai tersangka wajib diberitahukan terlebih dahulu baik melalui surat maupun lisan sebelum proses penangkapan dilakukan; 2) Penangkapan terhadap anak tidak dibolehkan dengan menggunakan alat atau senjata upaya paksa atau wewenang paksa; 3) Tersangka anak haru segera mendapat bantuan hukum secara wajib dan cuma-cuma (dalam penangkapan penyidik penuntut umum harus mengikutsertakan seorang pengacara yang kelak akan menjadi penasehat hukum anak tersebut); 4) Tersangka anak atau orang belum dewasa harus segera mendapatkan proses pemeriksaan; 5) Hak untuk mendapatkan ganti kerugian sebagai akibat dari kesalahan.[[6]](#footnote-7)

**Penahanan**

Setelah tindakan penangkapan, dapat dilakukan tindakan penahanan. Menurut Pasal 1 butir 21 KUHAP : “Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Berdasarkan wewenang tersebut maka setiap instansi penegak hukum memiliki wewenang untuk melakukan penahanan.

Penahanan oleh penyidik anak atau penuntut umum anak atau hakim anak dengan penetapan, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP, menentukan bahwa tersangka atau terdakwa dapat ditahan. Karena ada istilah “dapat” ditahan, berarti penahanan anak tidak selalu harus dilakukan, sehingga dalam hal ini penyidik diharap betul-betul mempertimbangkan apabila melakukan penahanan anak.Menurut Pasal 21 ayat (1) KUHAP, alasan penahanan adalah karena ada kehawatiran melarikan diri, agar tidak merusak atau menghilangkan barang bukti, agar tidak mengulangi tindak pidana.Menurut hukum acara pidana, menghilangkan kemerdekaan seseorang tidak merupakan keharusan, tetapi untuk mencari kebenaran bahwa seseorang melanggar hukum, kemerdekaan seseorang itu dibatasi dengan melakukan penangkapan dan penahanan.

Penahanan Anak harus memperhatikan kepentingan yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental, maupun sosial anak serta mempertimbangkan kepentingan masyarakat misalnya dengan ditahannya anak akan membuat masyarakat aman dan tentram.[[7]](#footnote-8)

Lahirnya Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2012 Nomor153, Tambahan lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor53327, yang diundangkan pada tanggal 30 Juli 2012 (TLNRI 2012-153) merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang efektif mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Apabila ditelusuri, alasan utama pengganti Undang-Undang tersebut dikarenakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena secara komprehensif belum memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum.[[8]](#footnote-9)

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidan Anak secara tegas telah mengatur tentang perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukummelalui diversi dalam Bab II, dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10, 11,12,13,14,15.

**Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian**

Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif. Ini berarti dilindunginya anak untuk memperoleh dan mempertahankan haknya untuk hidup, mempunyai kelangsungan hidup, bertumbuh kembang dan perlindungan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya sendiri atau bersama para pelindungnya[[9]](#footnote-10).

Menurut Pasal 1 Nomor 2 , Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat  hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Pada umumnya, upaya  perlindungan anak dapat dibagi menjadi perlindungan langsung dan tidak langsung, dan  perlindungan yuridis dan non-yuridis. Upaya-upaya perlindungan secara langsung di antaranya meliputi: pengadaan sesuatu agar anak terlindungi dan diselamatkan dari  sesuatu yang membahayakannya, pencegahan dari segala sesuatu yang dapat merugikan atau mengorbankan anak, pengawasan, penjagaan terhadap gangguan dari dalam dirinya atau dari luar dirinya, pembinaan (mental, fisik, sosial), pemasyarakatan pendidikan formal dan informal, pengasuhan (asah, asih, asuh), pengganjaran (*reward*), pengaturan dalam peraturan perundang-undangan.

Ditinjau dari sifat perlindungannya, perlindungan anak juga dapat dibedakan dari menjadi: perlindungan yang bersifat yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang hukum perdata dan dalam hukum pidana; perlindungan yang bersifat non-yuridis, meliputi perlindungan di bidang sosial, bidang kesehatan dan bidang pendidikan[[10]](#footnote-11).

Perlindungan yang bersifat yuridis atau yang lebih dikenal dengan perlindungan hukum. Menurut Barda Nawawi Arief adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak[[11]](#footnote-12).

Dalam hukum pidana, perlindungan anak selain diatur dalam Pasal 45, 46, dan 47 KUHP (telah dicabut dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Kemudian, terdapat juga beberapa pasal yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan perlindungan anak, yaitu antara lain Pasal 278, Pasal 283, Pasal 287, Pasal 290, Pasal 297, Pasal 301, Pasal 305, Pasal 308, Pasal 341 dan Pasal 356 KUHP.

Selanjutnya, dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak yang pada prinsipnya mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak. Dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1979, tentang Kesejahteraan Anak, pada prinsipnya diatur mengenai upaya-upaya untuk mencapai kesejahteraan anak. Perlindungan anak yang bersifat non-yuridis dapat berupa, pengadaan kondisi sosial dan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan anak, kemudian upaya  peningkatan kesehatan dan gizi anak-anak, serta peningkatan kualitas pendidikan melalui berbagai program bea siswa dan pengadaan fasilitas pendidikan yang lebih lengkap dan canggih.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, acara peradilan pidana anak diatur dalam Bab III mulai dari Pasal 16 sampai dengan Pasal 62, artinya ada 47 pasal yang mengatur hukum acara pidana anak. Sebagai bentuk pemberian jaminan perlindungan hak-hak anak. Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, dan Hakim Anak wajib memberikan perlindungan khusus bagi anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukan dalam situasi darurat serta perlindungan khusus dan dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi tanpa pemberatan.

Pada proses persidangan masih menggunakan model yang ada dalam Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 22 berupa larangan menggunakan toga atau atribut kedinasan bagi petugas.

**Penangkapan dan Penahanan**

Mengenai tindakan penangkapan dan penahanan tidak diatur secara rinci dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga berlaku ketentuan-ketentuan KUHAP. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menetukan bahwa Penangkapan terhadap anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam dan anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak. Penahan dilakukan untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum dapat melakukan penahanan paling lama 5 (lima) hari. Jangka waktu penahanan sebagaimana permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh hakim pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari dan dalam hal jangka waktu dimaksud telah berakhir, anak wajib dikeluarkan demi hukum.[[12]](#footnote-13) Dasar diperkenankan suatu penahanan anak, adalah adanya dugaan keras berdasarkan bukti yang cukup, bahwa anak melakukan tindak pidana (kenakalan). Menjamin agar ketentuan mengenai dasar penahanan ini dilaksanakan, diadakan institusi pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan di instansi masing-masing, yang merupakan *built in control* maupun pengawasan sebagai sistem *checking* antara penegak hukum.[[13]](#footnote-14)

Melakukan tindakan penangkapan, asas praduga tak bersalah harus dihormati dan dijunjung tinggi sesuai dengan harkat dan martabat anak sebagai kelompok yang tidak mampu atau belum mengetahui tentang masalah hukum yang terjadi pada diri anak tersebut.[[14]](#footnote-15) Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ke tempat tertentu oleh Penyidik Anak atau Penuntut Umum Anak atau Hakim Anak dengan penetapan, menurut cara yang diatur dalam undang-undang.[[15]](#footnote-16) Apabila penahanan mengangu perkembangan fisik, mental dan sosial anak, maka penahanan anak tidak dilakukan. Penahanan dilakukan sebagai upaya terakhir/tindakan terakhir (*ultimum remedium)* dalam jangka waktu singkat/pendek.[[16]](#footnote-17)

**Proses Penyidikan**

Dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa penyidikan anak. Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penyidik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak, harus dipandang sama sebagaimana dengan layaknya status dan fungsi seorang penyidik yang ditetapkan oleh KUHAP. Penyidikan terhadap anak tersebut haruslah dalam suasana kekeluargaan. Pasal 27 ayat 1 UU No. 11 tahun 2012, menentukan bahwa dalam melakukan penyidikan anak nakal, penyidik dibantu pembimbing kemasyarakatan. Proses penyidikan anak nakal, wajib dirahasiakan ( Pasal 19 ayat 1 UU No. 11 Tahun 2012).

**III.PENUTUP**

**Kesimpulan**

Pengaturan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana telah diatur khusus di dalam peraturan perundang-undangan. Dalam memberikan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana kepada anak yang berhadapan dengan hukum, dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 telah diatur tentang Diversi berupa pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses dari peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Bentuk perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana pencurian dapat diterapkan disetiap tahapan-tahapan pemeriksaan, baik ditahapan penyidikan, penuntutan, di tahap sidang pengadilan (pemeriksaan perkara) dan di tahap pembinaan (Lembaga Pemasyarakatan).

**Saran**

Diharapkan kepada para penegak hukum supaya memperhatikan norma-norma yang terkandung di dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penanganan anak yang bermasalah, supaya hak-hak anak tetap terjaga dalam setiap proses penanganan anak yang bermasalah dengan hukum.

Penulis berharap agar pihak masyarakat dan pemerintah setempat bersedia menerima dan membantu mengawasi anak yang melakukan tindak pidana pencurian ditengah-tengah kehidupan mereka setelah proses hukumnya selesai, dengan tujuan mencegah anak yang melakukan tindak pidana pencurian tidak mengulangi lagi kejahatannya lagi dan perbuatan yang sama pada khususnya, sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bersifat memperbaiki diri terdakwa.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku-Buku**

Arief Nawawi Barda, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*,  Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.

Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia,* PT.Refika Adiatama, Bandung.

Hamzah Andi, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia,* Cet.5, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Hasan Maulana, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak,* PT. Grasindo, Jakarta, 2000).

Selly Thelma M kadja, *Perlindungan Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan,* Jurnal HukumYurisprudensia, Jakarta, No.2 Mei 2000.

Waddong Hassan Maulana, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PT. Gramedia Indonesia, Jakarta 2000.

Wajdi Farid, *Perlindungan Anak di Indonesia Dilema dan Solusinya*, Penerbit P.T. Sofmedia, Medan, 2012.

1. **Websaite**

http://gagasanhukum.wordpress.com/2013/04/15/eksistensi-uu-sistem-peradilan-pidanaanak-bagian-i/, di akses tanggal 10 Januari 2017

<http://www.antara.co.id> *Kasus Kekerasan Terhadap Anak Meningkat*. Dalam. Diakses tanggal 10 Januari 2017.

1. **Peraturan-Peraturan**

Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara No. 127 tahun 1958.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Tahun 1981 No. 76

Indonesia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297

Indonesia, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 3

1. Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang *Perlindungan Anak*, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606 [↑](#footnote-ref-2)
2. Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*,  Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 155 [↑](#footnote-ref-3)
3. Farid Wajdi, *Perlindungan Anak di Indonesia Dilema dan Solusinya*, Penerbit P.T. Sofmedia, Medan, 2012, hlm.6 [↑](#footnote-ref-4)
4. Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia,* Cet.5, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal.118. [↑](#footnote-ref-5)
5. Marlina, *Op. Cit*, hal. 86 [↑](#footnote-ref-6)
6. Thelma Selly M kadja,*Perlindungan Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan,* Jurnal HukumYurisprudensia, Jakarta, No.2 Mei 2000, hlm.184-185 [↑](#footnote-ref-7)
7. http://aminhamid09.wordpress.com/perlindungan-hukum-terhadap-anakpada-tahap-penyidikan, Diakses Selasa, 23 Januari 2017 [↑](#footnote-ref-8)
8. 31http://gagasanhukum.wordpress.com/2013/04/15/eksistensi-uu-sistem-peradilan-pidanaanak-bagian-i/, di akses tanggal 10 Januari 2017 [↑](#footnote-ref-9)
9. Ibid [↑](#footnote-ref-10)
10. Maulana Hassan Waddong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PT. Gramedia Indonesia, Jakarta 2000, hlm. 40. [↑](#footnote-ref-11)
11. Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*,  Citra Aditya Bakti. Bandung, 1998, hlm.156. [↑](#footnote-ref-12)
12. Lihat Pasal 33 dan 34 UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak [↑](#footnote-ref-13)
13. Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia,* PT.Refika Adiatama, Bandung, 2014, hlm.124. [↑](#footnote-ref-14)
14. Maulana Hasan, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak,* PT. Grasindo, Jakarta, 2000), hlm 63. [↑](#footnote-ref-15)
15. Lilik Mulyani, *op.cit* hlm.122 [↑](#footnote-ref-16)
16. Maulana Hasan, *Ibid* hlm.126 [↑](#footnote-ref-17)